

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konflik

a. Definisi Konflik

Menurut Soejono Soekarno konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan (2006). Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham (Pruitt dan Rubin, 2009). Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Yang disusun oleh Poerwadarminta, konflik mempunyai arti yaitu pertentangan atau percekocokan. Pertentangan ini sendiri muncul kedalam sebuah bentuk pertentangan ide ataupun fisik antara kedua belah pihak yang sedang bersebrangan.

⁴Hakimul Ikhwan Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman Elaborasi pemikiran Ibn Khaldun. Pustaka Pelajar, yogyakarta, 2004, hal. 73.

Selain itu menurut Webster istilah *conflict* dalam bahasa latinnya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak (Pruit dan Rubin, 2009).

Konflik biasanya berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling betentangan atau berlawanan. Dalam sebuah bentuk ekstrimnya, konflik dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan juga eksistensi. Konflik juga bertujuan sampai pada tahap pembunuhan eksistensi orang ataupun kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau musuh ataupun saingannya. Konflik mengenai perebutan lahan ini jika dilihat dari segi positifnya yaitu konflik dapat menjadi sebuah awal dari terjadinya perubahan. Biasanya konflik ini terjadi akibat adanya pertentangan antara kelompok satu dengan yang lainnya akibat adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Karena ada salah satu yang rugi dan yang untung maka terjadilah konflik baik itu menjadi sebuah konflik berukuran skala kecil, sedang ataupun bahkan besar yang sampai bisa merenggut korban baik secara materi, mental, dan yang paling fatal adalah menelan korban jiwa.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, tujuan atau nilai yang ingin diraih yang menyebabkan suatu kondisi dimana tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok. Pada konflik perebutan lahan ini terjadi konflik antar

kelompok dengan kelompok lain yaitu pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Menurut Taman Dan Burgess, keduanya memandang konflik sebagai bentuk yang berbeda dari kompetisi ataupun persaingan. Mereka menulis, keduanya merupakan bentuk interaksi, kompetisi, atau persaingan adalah perjuangan antara individu atau kelompok individu yang dilakukan tanpa melalui kontak dan komunikasi. Di lain pihak konflik ialah sebuah perlombaan di mana terjadi kontak sebagai kondisi yang sangat diperlukan.

b. Jenis Jenis Konflik

Konflik yang timbul dalam masyarakat mempunyai banyak sekali bentuknya, ragamnya, dan juga jenis nya. Soetopo (1999) mengklasifikasikan jenis jenis konflik dipandang dari segi materinya menjadi empat, yaitu :

1. Konflik tujuan

Konflik tujuan yaitu konflik terjadi jika ada dua tujuan atau yang kompetitif bahkan yang kontradiktif.

2. Konflik peranan

Konflik peranan yaitu konflik yang timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan tiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama.

3. Konflik nilai

yang dimiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama, sehingga konflik dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan organisasi.

4. Konflik kebijakan

Konflik kebijakan yaitu suatu konflik dapat terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang ditemukan oleh satu pihak oleh kebijakannya.

c. Akibat Terjadinya Konflik

Konflik yang berkepanjangan akan menimbulkan dampak kepada suatu masyarakat, baik itu dampak secara positif ataupun negatif. Adapun beberapa contoh dampak *social conflict* adalah sebagai berikut ini:

1. Dampak Negatif

- Terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan dan permusuhan antar kelompok masyarakat.
- Timbulnya pandangan negatif terhadap kelompok yang berbeda sehingga sikap dan tindakan terhadap kelompok tersebut menjadi buruk.
- Timbulnya sikap dan tindakan yang deskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang berbeda karena alasan tertentu.

2. Dampak Positif

- Solidaritas setiap kelompok masyarakat menjadi lebih besar ketika terjadi perselisihan dengan pihak asing.
- Munculnya berbagai forum yang mendiskusikan aspek kehidupan yang baru.
- Konflik sosial dapat menghasilkan jalan tengah dan win-win solution bagi pihak-pihak yang berseteru.

d. Faktor Penyebab Konflik

Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan konflik dibagi menjadi beberapa, diantaranya;

1) Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu ataupun kelompok menjadi sumber lain dari pertentangan baik itu secara kepentingan ekonomi, politik, ataupun sebagainya.

2) Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara satu sama lainnya, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.

3) Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan sangat cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam sebuah masyarakat yang

akan menyebabkan munculnya golongan-golongan yang akan berbeda-beda pendiriannya.

4) Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan yang bergantung pula pada pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

a. Cara Penyelesaian Konflik

Beberapa cara dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik (Soerjono Soekanto, 1990:77-78), yaitu:

1. *Compromise*

Suatu cara yang dimana pihak-pihak yang terlibat konflik saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada

2. *Mediation* (Penengahan)

Menggunakan mediator yang diundang untuk bisa menengahi konflik. Mediator juga dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu.

3. *Conciliation*

Langkah ini merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berselisih demi tercapainya atau terwujudnya suatu persetujuan bersama

4. *Coercion* (Paksaan)

Coercion merupakan sebuah usaha penyelesaian dengan cara memaksa dan menekan pihak lain supaya menyerah, paksaan merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah apabila dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan juga menyerah secara terpaksa.

5. *Arbitration*

Langkah yang terakhir ini merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Pihak ketiga mendengarkan keluhan atau pendapat kedua belah pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan yang mengikat.

Konsep sentral dari teori konflik ini adalah wewenang dan juga posisi yang keduanya miliki merupakan fakta sosial. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi salah satu faktor yang menentukan konflik lahan secara sistematis, karena didalam masyarakat selalu terdapat golongan-golongan yang saling bertentangan yaitu penguasa dan yang dikuasai.

Teori konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat merupakan pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas posisinya dan juga menekan peran kekuasaan dalam mempertahankan keterlibatan dalam sebuah masyarakat.

2.1.2 Warga / Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris mempunyai arti yaitu *Society*, yang berarti kawan. Sedangkan masyarakat sendiri berasal dari kata bahasa Arab yaitu *syakara* yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Apabila disimpulkan secara utuh maka masyarakat mempunyai arti sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi satu sama lainnya.

Menurut pendapat dari Koerniatmanto S, warga negara ialah anggota negara yang memiliki status khusus mengenai negaranya, memiliki interaksi hak dan kewajiban yang berbentuk timbal-balik mengenai negaranya. Adapun definisi warga / masyarakat menurut beberapa ahli yaitu:

- a. Menurut pendapat dari Graham Murdock, warga negara ialah suatu hak untuk bisa berperan serta secara kongkret dalam beragam bentuk struktur sosial, politik dan kehidupan kultural serta untuk bisa menolong membentuk bagian-bagian yang seterusnya dengan begitu maka memperbesar gagasan-gagasan.
- b. Menurut pendapat dari Ko Swaw Sik, warga negara ialah hubungan hukum antara Negara dan seseorang. Dan hubungan tersebut berupa suatu “ikatan politis” antara Negara yang memperoleh status sebagai Negara yang independen & diakui karena mempunyai tata Negara.
- c. Menurut Abdul Syani, warga / masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah

menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidupbersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.⁵

- d. Menurut Abu Ahmadi warga / masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat, yang ditaati dalam lingkungannya.⁶

⁵Diakses dari <https://pakdosen.co.id/pengertian-warga-negara/>”Pengertian Warga Negara” pada tanggal 12 November 2019 pukul 15.20

⁶Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal.97

- e. Menurut Supriyo Priyanto warga negara berarti anggota keluarga negara. Mereka adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara.⁷

Berdasarkan pada pengertian tentang masyarakat / warga dari beberapa tokoh diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama-sama dalam kurun waktu lama dan menempati suatu wilayah tertentu dalam membentuk suatu sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan.

2.1.3 Pemerintah Daerah

a. Definisi

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷Priyanto, Supriyo, Pendidikan Kewarganegaraan, Fasindo, Semarang, 2009, hal.173

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.⁸

Penyelenggara pemerintah daerah yang dimaksud diatas adalah seperti Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan perangkat lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lain yang diatur oleh Sekretaris Daerah). Sedangkan lembaga legislatif yang berada di daerah adalah DPRD 1 untuk tingkat provinsi, dan DPRD 2 untuk tingkat kabupaten atau kota.

b. Fungsi

Fungsi dari pemerintah daerah ini dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan dan mengatur jalannya pemerintahan, adapun fungsinya yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004.

⁸Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia "Pemerintahan Daerah di Indonesia", pada tanggal 12 November 2019 pukul 19.59

Pertama, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Kedua, menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

c. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang dari pemerintah daerah ini telah tertulis pada Undang-Undang nomor 32 Pasal 25 tahun 2004. Tugas dan wewenang pemerintah daerah meliputi mengajukan rencana Perda, Menerapkan Perda yang telah disepakati bersama DPRD, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, Memimpin dan Mewakili daerahnya didalam ataupun diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama DPRD.

Itulah beberapa tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam undang-undang dan wajib dijalankan oleh semua pemerintah daerah.

2.1.4 Pembangunan

Pembangunan sering kali dikaitkan dengan ekonomi, politik, mental dan berbagai bidang lainnya. Selain itu, pembangunan juga sering dikaitkan dengan perubahan ke arah yang lebih baik atau perubahan dari

hal lama ke hal baru. Jadi, secara singkat pengertian pembangunan adalah setiap kegiatan terencana guna mencapai perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan mempunyai arti proses, cara, perbuatan membangun. Selain itu terdapat pembangunan menurut beberapa tokoh seperti berikut:

a. Menurut Katz

Mengatakan pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai “pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan ialah pembinaan bangsa “national building” atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai pembangunan yang telah dicangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa kepentingan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahannya proses-proses pelaksanaan pembangunan.

b. Menurut Ginanjar Kartasasmita “1994”

Memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

c. Menurut Effendi “2002:2”

Menurutnya pembangunan ialah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

⁹Diakses dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/>“Pengertian Pembangunan Para Ahli”, pada tanggal 12 November pukul 21.03

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah seperangkat konsep, definisi, proposisi yang telah disusun dengan sangat rapih, dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini pula akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Oleh sebab itu, pembuatan landasan teori secara baik dan juga benar dalam sebuah penelitian menjadi salah satu hal yang penting, karena landasan teori akan menjadi sebuah pondasi dan landasan untuk penelitian.

Untuk membantu penulis agar lebih memudahkan dalam menganalisis data, serta untuk mendapatkan jawaban permasalahan dalam penelitian ini, maka sangat dibutuhkan sebuah landasan teori sebagai kerangka intelektual. Berdasarkan asumsi tersebut teori yang relevan dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan teori manajemen konflik sebagai pondasi dan patokan dalam sebuah penelitian. Titik fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik bisa terjadi dan juga bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Teori tersebut melihat bahwa konflik yang terjadi tidak bisa berdisi sendiri.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen konflik, menurut Minnery manajemen konflik adalah suatu proses, sama halnya dengan perencanaan merupakan proses. Beliau juga berpendapat bahwa proses manajemen konflik perencanaan sebagai bagian yang rasional dan bersifat iteratif, berarti pendekatan model manajemen konflik perencanaan secara terus menerus atau continue akan mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang ideal dan representatif. Dengan demikian tahapan manajemen konflik perencanaan juga meliputi beberapa langkah yaitu; penerimaan terhadap keberadaan konflik (dihindari, ditekan, atau didiamkan), klasifikasi karakteristik dan struktur konflik, evaluasi konflik (jika bermanfaat maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya), menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik, serta menentukan peran perencanaan sebagai partisipan atau pihak

ketiga dalam mengelola konflik. Maka keseluruhan proses yang berlangsung dalam tahap perencanaan ini yang melibatkan perencanaan atau planner sebagai aktor untuk mengelola konflik baik sebagai partisipan atau juga menjadi pihak ketiga.

Sedangkan menurut Dawn M. Baskerville, dia menganggap bahwa ada setidaknya 6 tipe manajemen konflik yaitu: avoiding, accommodating, compromising, competing, collaborating, dan conglomeration. Avoiding adalah individu ataupun organisasi pada umumnya cenderung menghindari konflik. Berbagai hal sensitif dan berpotensi menyebabkan konflik sebisa mungkin dihindari. Ini adalah cara yang paling efektif untuk menjaga lingkungan terhindar dari konflik. Accommodating merupakan cara mengumpulkan berbagai pendapat dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan mengumpulkan berbagai macam pendapat, maka organisasi dapat mencari jalan keluar. Lalu, compromising cenderung memperhatikan pendapat dan kepentingan semua pihak. Competing adalah cara menyelesaikan konflik dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenangkan kepentingannya masing-masing. Selanjutnya, collaborating merupakan metode menyelesaikan konflik dengan bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan karena semua pihak bersinergi dalam menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat konflik. Dan yang terakhir adalah conglomeration yang merupakan penyelesaian konflik dengan mengkombinasikan kelima tipe manajemen

konflik diatas. Tipe ini membutuhkan tenaga, pikiran dan juga waktu yang besar dalam proses penyelesaian konfliknya.

Selain itu ada 5 tahap untuk bisa memahami manajemen konflik dengan baik menurut Stevenin. Dengan memahami 5 tahapan ini maka organisasi dapat lebih mudah dalam merumuskan strategi terbaik dalam penanganan konflik. 5 tahap itu adalah pengenalan, diagnosis, menyepakati solusi, pelaksanaan, dan evaluasi.

Sedangkan untuk teknik penyelesaian konflik itu sendiri setidaknya mempunyai 6 cara yang dapat ditempuh, yaitu; yang pertama, persuasi merupakan usaha mengubah posisi pihak lain dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul. Kedua, rujuk merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerja sama dan menjalani hubungan yang lebih baik, demi kepentingan bersama. Ketiga, penarikan diri suatu penyelesaian masalah dengan meminta salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Keempat, pemecahan masalah terpadu yaitu usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua belah pihak. Kelima, tawar-menawar merupakan suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak dengan saling mempertukarkan konsesi yang dapat diterima. Keenam, adalah pemaksaan atau penekanan yang merupakan cara memaksa atau menekan pihak lain agar menyerah. Dan yang terakhir adalah intervensi pihak ketiga, apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan buntu, maka pihak ketiga dapat dilibatkan dalam penyelesaian.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak dapat menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Tetapi penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut ini merupakan salah satu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sahlan dengan judul penelitian “Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Pada Eksplorasi Tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penilaian yang dilakukan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran, dan mencari kembali suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya konflik di kecamatan lambu kabupaten Bima, dan apa saja faktor yang menyebabkan meluasnya eskalasi konflik di kecamatan lambu kabupaten Bima serta apa saja resolusi konflik kasus ijin pertambangan yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat.

Konflik yang terjadi di kecamatan Lambu kabupaten Bima ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkannya; kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dirasa kurang tepat dengan nilai-nilai yang termuat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Selain itu, kebijakan tersebut dapat mengganggu kepentingan orang banyak, terutama masyarakat Lambu yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai seorang petani. Serta adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat terkait penggunaan lahan. Selain itu juga, konflik tersebut mengalami eskalasi konflik yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi, kurang netralnya pemerintah maupun stekholder lainnya, komunikasi politik yang macet dan juga tidak berjalan dengan baik, serta penanganan konflik yang lambat dari pihak pemerintah. Pemerintah maupun seperti negosiasi, konsultasi, mediasi, dan terakhir arbitrase.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah mempunyai persamaan tentang konflik perebutan lahan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu juga mempunyai persamaan mengenai faktor penyebab serta upaya penyelesaian konflik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian inipun sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berdasarkan kepada teknik pengumpulan data mulai observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Persamaan metode penelitian juga terdapat pada teknik pengambilan sampel purposive sampling.

2. Penelitian dari Febriana Muryanto (Skripsi, 2011), dari jurusan Pendidikan Sosiologi UNY. Mengenai “Faktor Penyebab Konflik Slemania dan Brajamusti dalam Persepakbolaan Didaerah Yogyakarta”. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab konflik itu muncul, bentuk-bentuk konflik serta dampak dari konflik tersebut terhadap suporter baik dari kelompok slemania ataupun dari kelompok brajamusti.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik antara kedua suporter itu terjadi sejak tahun 2001. Faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut; 1. Provokator dalam suporter, karena ada banyaknya anggota dari kelompok slemania dan juga brajamusti, berdampak kepada sulitnya mengontrol apa yang dilakukan setiap individu. Selain itu juga tindakan represif aparat keamanan juga menjadi salah satu faktor penyebab didalamnya. 2. Strata tim, kedua suporter ini merupakan suporter resmi dari PSS dan juga PSIM. Konflik diantara mereka mempunyai hubungan dengan naik dan turunnya strata tim yang mereka dukung. Hal inilah yang mengakibatkan animal power dari suporter muncul dan apabila hasil yang diharapkan itu tidak sesuai suporter maka frustrasi dan kekecewaan menghapiri suporter tersebut. 3. Derbi (dua atau lebih tim dari satu daerah yang sama), Slemania dan Brajamusti mempunyai kedudukan yang berdekatan, hal ini

menyebabkan pertemuan kedua kelompok suporter besar ini secara fisik akan sering sekali berjumpa. 4) Kinerja dari perangkat pertandingan. Bentuk konfliknya anatara lain lagu-lagu rasis, ancaman-ancaman, serta bentrok fisik. Dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut adalah adanya luka fisik, fobia, finansial, tumbuhnya solidaritas kelompok dan juga akomodasi.

Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konflik yang terjadi antara dua pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian inipun sama-sama menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data mulai observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan dalam penelitian ini, peneliti fokus pada faktor-faktor mengapa konflik itu bisa terjadi dan bentuk-bentuk konflik yang terjadi. Subjek yang diteliti adalah kelompok suporter sepakbola. Sedangkan peneliti memfokuskan pada apa saja dampak yang terjadi akibat dari konflik ini dan juga bagaimana penyelesaiannya, subjek yang diteliti adalah masyarakat dan pemerintah daerahnya.

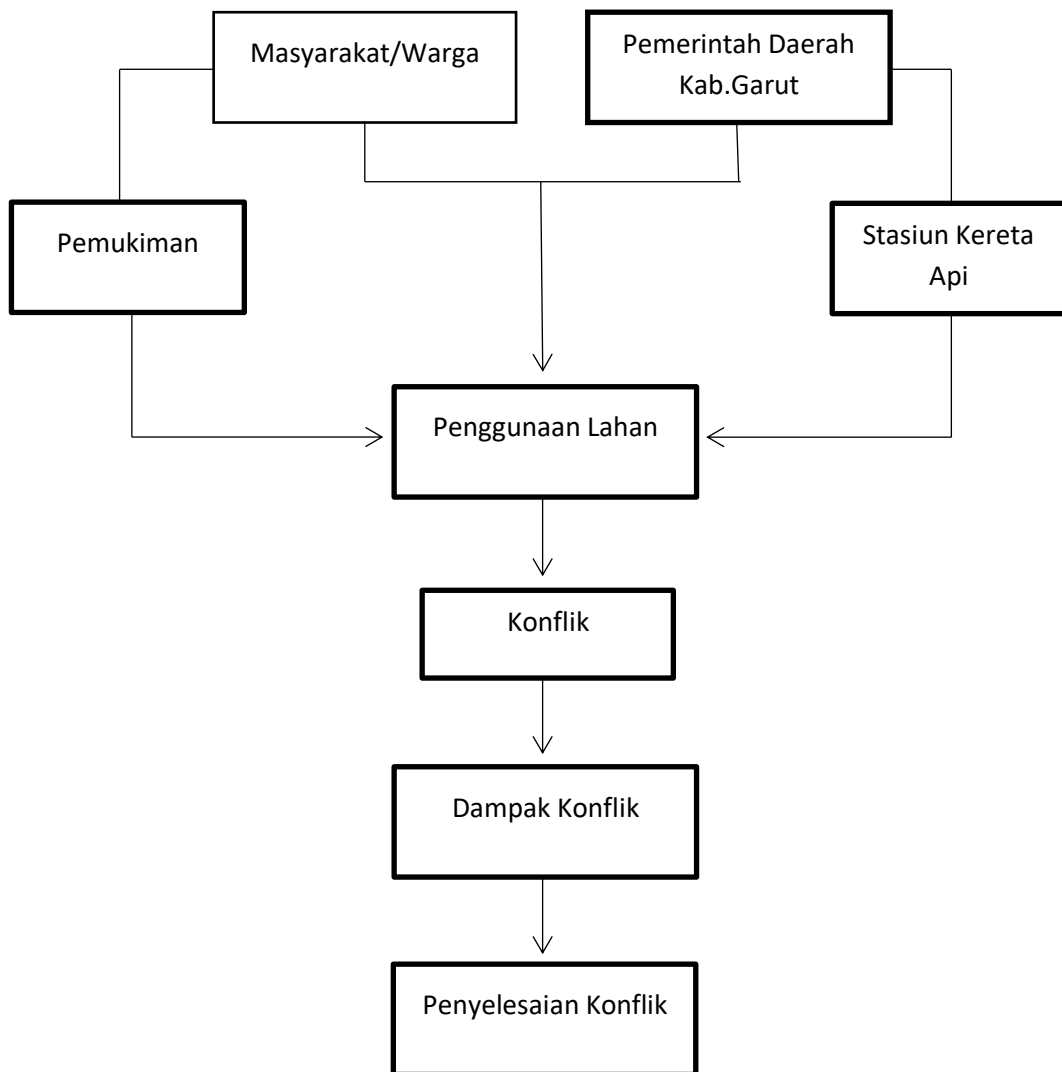
2.4 Kerangka pemikiran

Masyarakat/warga merupakan sekumpulan individu yang hidup didalam suatu wilayah tertentu dengan waktu yang lama serta memiliki nilai dan norma didalamnya. Lahan yang menjadi konflik dipergunakan oleh sebagian warga untuk dijadikan tempat tinggal, berbeda dengan

pemerintah garut yang akan mempergunakannya sebagai stasiun sekaligus jalur rel kereta api.

Perbedaan penggunaan lahan tersebut, menimbulkan konflik antara masyarakat setempat yang terkena dampak dengan pemerintah kabupaten Garut. Konflik lahir dari interaksi antarindividu maupun kelompok dalam berbagai bentuk aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Konflik yang terjadi ini muncul karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti perbedaan kepentingan dalam penggunaannya. Konflik yang terjadi menyebabkan dampak bagi masyarakat, baik itu secara sosial maupun ekonomi yang dialami oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. terjadinya suatu konflik dapat memunculkan cara untuk penyelesaian masalah tersebut agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan dapat terselesaikan sehingga tercapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak.



Gambar 1: Kerangka Berpikir